1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Perkembangan inflasi Kabupaten Minahasa Selatan pada September 2026 menunjukkan adanya peningkatan tekanan harga yang cukup signifikan. Inflasi month-to-month tercatat sebesar 3,12 persen, inflasi year-to-date sebesar 6,77 persen dan inflasi year-on-year sebesar 7,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 116,67.

   Tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang memberikan andil sebesar 6,22 persen, sementara kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,30 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,28 persen, serta perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,24 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga dan ketersediaan komoditas pangan masih menjadi faktor utama yang perlu mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi daerah. Ke depan, risiko inflasi perlu diantisipasi melalui penguatan pemantauan harga dan stok Bapokting, kelancaran distribusi, pengawasan pasar, penguatan koordinasi dengan pelaku usaha dan distributor, serta pelaksanaan intervensi pasar secara tepat waktu terhadap komoditas yang mengalami tekanan harga.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Minahasa Selatan pada September 2026 terutama berkaitan dengan meningkatnya tekanan inflasi tahunan yang mencapai 7,47 persen, dengan sumber tekanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang memberikan andil sebesar 6,22 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga dan ketersediaan komoditas pangan masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi daerah. Selain itu, masih terdapat tekanan harga pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran serta kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga. Perkembangan inflasi yang mengalami peningkatan cukup tajam dari 3,92 persen pada Agustus menjadi 7,47 persen pada September 2026 juga menunjukkan perlunya penguatan pemantauan harga dan stok, kelancaran distribusi Bapokting, serta respons intervensi yang cepat terhadap komoditas yang mengalami tekanan harga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Minahasa Selatan pada Triwulan III adalah:

   1. Melakukan sidak pasar 54 menjelang Hari Pengucapan Syukur. Kebijakan ini dilakukan untuk memantau harga dan ketersediaan Bapokting secara rutin di pasar tradisional, pasar modern, distributor dan tingkat produsen, terutama terhadap komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga menjelang Pengucapan Syukur Kabupaten Minahasa Selatan.

   2. Melakukan pengawasan terhadap penimbunan, permainan harga, serta distribusi Gas LPG 3 Kg yang tidak sesuai ketentuan.

   3. Melaksanakan pasar murah/Gerakan Pangan Murah pada bulan September sebagai langkah

intervensi pada komoditas yang mengalami kenaikan signifikan dan mempunyai dampak besar terhadap inflasi seperti beras, gula, telur, cabe rawit, bawang merah, dan lainnya.

4. Melakukan Rapat koordinasi antara BPS dan instansi terkait melalui rapat TPID dan untuk memantau kondisi harga secara berkala. Setiap kenaikan harga yang signifikan perlu segera diikuti dengan identifikasi penyebab dan langkah penanganan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi daerah menunjukkan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan bersama TPID, antara lain pemantauan harga dan stok Bapokting, pengawasan pasar, fasilitasi distribusi pangan, koordinasi dengan pelaku usaha dan distributor serta intervensi pasar, perlu terus diperkuat. Hal ini sejalan dengan perkembangan inflasi September 2026 yang mencapai 7,47 persen secara year-on-year, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,92 persen. Tekanan inflasi yang terutama berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 6,22 persen menunjukkan bahwa pengendalian harga pangan masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, ke depan diperlukan peningkatan efektivitas pemantauan harga dan stok, percepatan respons terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga, penguatan kerja sama antardaerah dalam menjamin pasokan, serta evaluasi terhadap rantai distribusi. Selain itu, penguatan produksi pangan lokal dan sistem peringatan dini terhadap potensi gejolak harga perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Minahasa Selatan diarahkan pada penguatan stabilisasi harga pangan melalui peningkatan pemantauan harga dan stok Bapokting, pengamanan pasokan, penguatan distribusi, serta pelaksanaan intervensi pasar dan Gerakan Pangan Murah secara tepat sasaran. Mengingat kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi September 2026, maka pengendalian komoditas pangan perlu menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah bersama TPID juga perlu memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjamin ketersediaan pasokan, meningkatkan produksi pangan lokal, memperkuat pengawasan distribusi dan perdagangan, serta mengembangkan sistem peringatan dini terhadap potensi gejolak harga. Setiap kebijakan dan intervensi perlu dilengkapi dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaannya dapat memberikan dampak yang nyata terhadap stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah.